**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena yang mendasari penelitian ini. Lalu terdapat identifikasi masalah yang merupakan uraian mengenai masalah yang dipertanyakan, batasan penelitian yang merupakan kriteria untuk mempersempit masalah yang diidentifikasi, batasan penelitian yang menjelaskan objek penelitian yang akan dilakukan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2015 hingga 2017 dengan sumber data berupa laporan tahunan dan *sustainability report.*

Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang merupakan inti dari masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Setelah rumusan masalah dipaparkan, bab ini akan menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Bagian terakhir pada bab ini akan menjelaskan manfaat penelitian yang akan didapatkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perusahaan sungguh pesat. Perusahaan-perusahaan saling bersaing agar dapat mempertahankan eksistensinya. Pada dasarnya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, segala sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, misalnya penggundulan hutan, polusi udara dan air, dan sebagainya.

Sejak 1998, laju deforestasi mencapai 2,83 juta hektar setiap tahun. Polusi, penggundulan hutan, dan penebangan ilegal menyebar sangat cepat dan menjadi praktik sehari-hari (Cahyonowati & Darsono, 2013). Menurut Ford (2015) dalam Saputra (2016) dalam tempo waktu tiga tahun terakhir Indonesia telah kehilangan 45% hutan lindung, yang terjadi akibat adanya pembukaan lahan untuk kepentingan industri. Berkurangnya jumlah hutan lindung di Indonesia juga terjadi akibat adanya kebakaran hutan, yang terjadi akibat adanya proses pembakaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, dampak dari kebakaran hutan, telah menjadi Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon terbanyak di dunia. Setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari *Global Forest Resources Assessment* (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi yang mengalami kehilangan hutan setelah Brasil (Tempo, 2016) (<https://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar>)

Sektor pertambangan merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah Sepanjang pesisir Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar Awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, terhampar pasir hitam berkilauan. Pemandangan indah laut selatan di Jawa Timur ini telah dikotori dengan “kolam raksasa” yang bertebaran di tepi pantai. Kolam raksasa ini merupakan dampak penambangan pasir secara berlebihan. Penambangan disetujui oleh Kepala Desa Haryono dengan dalih perataan lahan untuk persiapan wisata pantai. Pasir terus dikeruk setiap hari selama dua tahun lebih hingga meninggalkan lubang seluas lapangan sepak bola sedalam empat meter. Kolam ini sudah menelan korban. Seorang anak tenggelam, terperosok ke dalam kolam.

Sawah warga setempat juga rusak karena dikeruk eskavator setiap hari. Tak hanya meninggalkan kolam, penambangan pasir juga mengancam pekerjaan warga yang mencari kerang di pantai. Sejak ada aktivitas penambangan, mereka kesulitan mendapat kerang.([www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html](http://www.benarnews.org/indonesian/berita/tambang-pasir-11052015122300.html))

Untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, masing masing perusahaan wajib melakukan *Corporate social responsibility*, yang merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Maiyarni et al., 2014). Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, perusahaan menyediakan informasi keuangan juga menyediakan informasi sosial dan lingkungan, yang kemudian disebut *sustainability report*. *Sustainability report* ini disusun dengan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Di dalam *sustainability reporting,* terdapat tiga konsep utama yaitu: aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial, yang mana ketiganya merupakan konsep *Triple Bottom Line Sustainability Reporting* (Kurniawan, Sofyani, & Rahmawati, 2018). *Triple bottom line* adalah konsep terkait keberlanjutan yang diciptakan oleh Elkington (1997). Konsep tersebut menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan 3P dalam menjaga ‘kehidupan’ bisnisnya. Bukan hanya mementingkan profit tetapi juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan aktif ikut serta melestarikan lingkungannya.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 40 (2007) yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menggunakan sumber daya alam. Bagian 74 dari peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan menekankan penganggaran dan estimasi sosial dan biaya lingkungan dalam laporan keuangan mereka. Pelaksanaannya mungkin membutuhkan perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan, program dan biayanya yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Di Indonesia, hingga tahun 2012 tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan sosial mereka dalam laporan keuangan. Pengungkapan kegiatan sosial dilakukan secara sukarela. Namun, sejak 1 Agustus 2012, Pemerintah Indonesia menerapkan Peraturan Pemerintah Kep-431 / BL / 2012 yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa semua perusahaan publik harus melaporkan kegiatan sosial mereka dalam laporan tahunan mereka (Rusmanto & Williams, 2015)

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu entitas, yang dapat diamati dari besarnya nilai total aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, bagi eksternal perusahaan maupun internal perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, makin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan, dan makin besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi, dalam mempertahankan eksistensi perusahaan (Maiyarni et al., 2014).

Menurut penelitian Nur & Priantinah (2012), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat diintrepretasikan bahwa semakin banyak jumlah aset maka akan semakin banyak pengungkapan CSR yang akan dilakukan perusahaan. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Maiyarni *et al*.,(2014), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR oleh perusahaan. Hal ini berarti jumlah total aktiva suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan pengungkapan CSR.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba dalam ukuran persentase. Penelitian Wulandari & Zulhaimi (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh dalam pengungkapan CSR. Hal ini juga sejalan dengan penelitian menurut Bagus et al., (2015) yaitu semakin mampu perusahaan menghasilkan laba, keadaan tersebut akan membuat perusahaan mendapat dampak positif dari lingkungan sekitar dalam penerapan CSR. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Yuliana (2008), yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Menurut penelitian Restu *et al* (2017), ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun menurut penelitian Yuliana (2008), ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Tugas dan kewenangan dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan atas jalannya usaha perusahaan dan memberikan nasihat kepada direktur. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dewan komisaris mempunyai fungsi pengawasan termasuk dalam penentuan program tanggung jawab sosial, tetapi direksilah yang mengambil keputusan operasional. Hasil tersebut mungkin dapat mengindikasikan kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

*Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Menurut penelitian Saputra (2016) menyatakan bahwa posisi *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial, dengan demikian mengisyaratkan bahwa semakin besar komposisi aliran dana yang bersumber dari hutang akan mendorong peningkatan jumlah pengungkapan *corporate social responsibility*. Ketika posisi *leverage* perusahaan terus mengalami peningkatan, asumsi pasar yang terbentuk akan menyimpulkan bahwa perusahaan sangat memiliki ketergantungan yang tinggi pada hutang, dan risiko untuk melaksanakan kegiatan investasi didalam perusahaan menjadi relatif tinggi, akan tetapi jika hutang ditingkatkan untuk memacu kinerja dan membiayai berbagai kegiatan yang produktif seperti peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial, kebijakan untuk mendorong peningkatan porsi hutang dianggap sangat tepat dilaksanakan.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Maiyarni *et al*., (2014), bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengungkapan lebih sedikit informasi CSR. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan lebih tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial.

Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi melalui kegiatan tanggung jawab sosial, maka perusahaan harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingannya secara efektif. Pengkomunikasian tanggung jawab sosial melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat (Nur & Priantinah, 2012). Menurut penelitian Widiawan *et al* (2017), pengungkapan media (*media exposure)* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor kinerja manajemen sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial (Bangun & Octavia, 2012). Namun menurut penelitian oleh Irjayanti (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak bepengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena kesadaran akan tanggung jawab sosial di Indonesia belum kokoh dan membudaya sehingga besar kecilnya kepernilikan institusional dalam negeri belum bisa memberikan dorongan atas diungkapkannya tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

keberadaan komite audit memiliki peran membatu dewan komisaris dalam mengawasi manajemen demi tercapainya kepentingan para stakeholder, bukan hanya kepentingan shareholder. Dengan adanya komite audit maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial perusahaan pun semakin meningkat (Septiani & Mutmainah, 2013). Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR karena jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Septiani & Mutmainah, 2013).

Berdasarkan analisis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, *leverage* dan pegungkapan media terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
5. Apakah pengungkapan media (*media exposure)* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
7. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
8. **Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis menetapkan batasan masalah untuk mengarahkan penulis untuk melakukan penelitian. Masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
5. Apakah pengungkapan media (*media exposure)* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017 ?
6. **Batasan Penelitian**

Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2015 – 2017 dan memiliki laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penulis.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, *leverage* dan pengungkapan media (*media exposure)* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2015 – 2017 ? “

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2015 – 2017
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017
3. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017
4. Untuk mengetahui apakah *leverage* mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017
5. Untuk mengetahui apakah *media exposure* mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada periode 2015 – 2017
6. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1. Bagi Industri

Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan sehubungan dengan penerapan tanggung jawab sosial dalam operasional perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan perusahaan

1. Bagi Pembaca

Menjadi referensi dan studi bagi penelitian selanjutnya dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk membuat peraturan agar bisa mengetahui seberapa penting pengungkapan tanggung jawab sosial dan harus dilakukan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama utuk industri pertambangan.